



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 757/II/2013

I/FEBRUARI 2013



Komisi IV :

Tata Kelola Buruk Sebabkan Harga Daging Tinggi

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA FEBRUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Minggu pertama bulan Februari ini dibuka dengan Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Februari diikuti berbagai Rapat Komisi dalam rangka fungsi pengawasan, dan legislasi, serta kegiatan di bidang diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu pertama Februari 2012.

Paripurna 5 Februari

Rapat Paripurna 5 Februari memiliki 2 agenda; Laporan Komisi III terhadap hasil uji kelayakan calon hakim agung dan keputusan tentang peraturan DPR-RI tentang peliputan pers di DPR-RI.

Mengenai penetapan calon hakim agung, didahului dengan laporan oleh Ketua Komisi III DPR mengenai rapat-rapat Komisi III terhadap penetapan calon-calon Hakim Agung untuk mengisi kekosongan 8 calon Hakim Agung. Dilaporkan bahwa, calon yang diajukan ada 24 orang, setelah melalui pembahasan beberapa kali rapat dan fit and proper test, Komisi III menetapkan 8 calon Hakim Agung sesuai dengan urutan perolehan suaranya yaitu: [1] H. Hamdi, SH. M.Hum., [2] Drs H.M. Syariffuddin, SH. MH., [3] I Gusti Agung Sumathana, SH. MH., [4] Dr. Irfan Fachrudin, SH. CN., [5] H. Margono, SH. M.Hum., MM. [6] Mayjend. TNI. Drs. Burhan Dahlan, SH. MH., [7] M. Sesnayeti, SH. MH., [8] Dr. Yakup Ginting, SH. CN. MKn.

Agenda mengenai persetujuan tentang peraturan DPR-RI Tentang Peliputan Pers Di DPR-RI, karena masih banyak saran dan pendapat yang harus diakomodir dalam peraturan ini, maka kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR, diberikan kesempatan 3 minggu untuk menyempurnakan dengan



mempertimbangkan masukan dari para anggota Dewan, sebagaimana dalam forum Rapat Paripurna.

Kegiatan Bidang Legislasi

Komisi-Komisi, Badan Legislasi dan Panitia Khusus masih melanjutkan rapat, mempersiapkan agenda bagi pengambilan keputusan di Komisi, Baleg, dan Pansus masing-masing. Diantara RUU yang segera akan siap memasuki pembicaraan tingkat II adalah RUU tentang Organisasi Masyarakat yang ditangani Pansus, RUU tentang Aparatur Sipil Negara yang ditangani Komisi II, RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Jaminan Produk Halal.

Pimpinan Dewan senantiasa melakukan pemantauan dan pada tanggal 6 februari dilakukan konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Pansus, Komisi dan Baleg, untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU.

70 RUU Prioritas tahun 2013 terdiri atas: [1] 31 RUU yang sedang dalam Tahap pembicaraan Tingkat II, [2] 2 RUU dalam Tahap harmonisasi di Baleg; [3] 25 RUU dalam Tahap akhir penyusunan (19 RUU DPR dan 6 RUU Pemerintah); [4] 5 RUU baru disiapkan oleh DPR; dan [5] 7 RUU baru disiapkan oleh Pemerintah.

Untuk RUU Kumulatif Terbuka yang ditetapkan sebagai Prolegnas RUU Prioritas tahun

2013, telah disepakati 5 RUU, yaitu: [1] tentang penegasian perjanjian internasional; [2] akibat putusan Mahkamah Konstitusi; [3] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; [4] tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; [5] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Kegiatan Bidang Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran, beberapa Komisi melakukan Raker dengan Pemerintah, untuk mencermati evaluasi perogram kerja dan pelaksanaan APBN 2012, serta rencana Program Kerja tahun 2013. Kegiatan itu meliputi Raker Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam, Badan Amil Zakat Nasional, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama.

Raker Komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama DPR-RI pada 15 Januari 2013 mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 dan Kinerja Dirjen Bimas Islam, serta tindak lanjut Hapsem I BPK-RI tahun anggaran 2012. Raker ini menyimpulkan bahwa [1] Komisi VIII meminta Pemerintah (Dirjen Bimas Islam) segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2012 yang belum selesai ditindaklanjuti. Evaluasi ini dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013. [2] meminta agar dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013, harus mencerminkan Tupoksi Inti Kementerian Agama RI, antara lain: peningkatan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan prioritas untuk terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, cerdas dan toleran; mengoptimalkan pelayanan perkawinan dan ketahanan keluarga dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. [3] peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan pemberdayaan Masjid dalam rangka pembinaan serta kerukunan umat beragama. [4] Pemerintah diminta untuk menyampaikan simulasi rasio kebutuhan anggaran Dirjen Bimas Islam, termasuk simulasi perbaikan pelayanan di KUA.

Raker dengan Badan Amil Zakat Nasional, Komisi VIII menyimpulkan bahwa [1] Baznas perlu melakukan optimalisasi potensi zakat dan dana sosial keagamaan, sehingga dapat memberikan nilai manfaat, baik dalam pengelolaan perolehan zakat maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat. [2] menyusun roadmap dalam mengoptimalkan capaian target tahun 2013 dan tahun berikutnya, dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta BUMN/swasta. [3] melakukan pendataan statistik mengenai potensi zakat (muzaki dan mustahik), serta data perubahan status mustahik menjadi munfik

atau muzaki. [4] meningkatkan profesionalisme dan manajemen dan kinerja organisasi Baznas.

Raker dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII menyimpulkan agar [1] pemerintah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2012 terkait dengan pengelolaan aset haji. Komisi VIII mengapresiasi penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengenai rencana dan strategi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 M. [2] Komisi VIII meminta agar pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013 mencerminkan Tupoksi Kementerian Agama, memperhatikan masukan Komisi VIII, terutama berkaitan dengan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi; perbaikan pengelolaan dan akuntabilitas dana haji sehingga manfaatnya dinikmati secara maksimal oleh jemaah haji. [3] Pemerintah diminta melakukan evaluasi dana talangan haji dan Penyederhanaan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Raker dengan Litbang/Diklat Kementerian Agama, menyimpulkan antara lain bahwa Pemerintah segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pertemuan BPK-RI tahun 2013, meningkatkan fungsi pengawasan sebagai pengendali dan penjamin mutu kinerja di lingkungan Kemenag RI melalui peningkatan kualitas SDM khususnya auditor.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Dari kegiatan Raker Komisi VIII dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tanggal 29 Januari, mengagendakan respon KPAI terhadap permasalahan anak Indonesia, serta tindak lanjut rekomendasi dan masukan kepada Presiden. Raker ini menyimpulkan antara lain, [1] Komisi VIII memberikan apresiasi kepada KPAI atas upayanya dalam menyikapi berbagai permasalahan anak antara lain terkait pemenuhan hak dasar anak (pendidikan, kesehatan, hak sipil, hak agama dan hak mendapat jaminan sosial) serta perlindungan khusus anak dari kekerasan, diskriminasi dan penyalahgunaan NAPZA. [2] KPAI agar menyempurnakan Standar Operator, Prosedur (SOP) tentang penanganan berbagai permasalahan dan kasus anak, serta menyampaikan laporan terbaru, tidak hanya peta permasalahan anak, namun juga peta potensi anak Indonesia, untuk membangun optimisme pembangunan bangsa ke depan. Melakukan perlindungan terhadap anak secara preventif antara lain dengan melakukan pola pengasuhan anak dalam keluarga dan memperkuat pola pengasuhan terhadap anak. [3] mendorong KPAI membangun sinergisitas dan bermitra strategis dengan beberapa pihak terkait, baik di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dan masyarakat.



Diplomasi Parlemen

Ketua DPR-RI DR. H. Marzuki Alie menerima kunjungan Delegasi Parlemen Brunei Darussalam pada hari Senin, 4 Februari 2013. Delegasi Brunei Darussalam dipimpin Ketua Parlemen H.E. Mr. Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Dato Perdana Menteri Dato Laila Haji Awang Ibrahim. Ketua DPR-RI menyambut dan mengapresiasi kunjungan ini, serta mendukung kepemimpinan *Legislative Council* Brunei Darussalam dalam menjalankan amanah ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Ketua DPR-RI menekankan perlunya peningkatan kerjasama antar parlemen yang lebih erat lagi, sebagaimana peningkatan kerjasama pada tingkat pemerintahan (eksekutif) yang telah berlangsung dengan baik.

Dalam bagian responnya, H.E. Haji Awang Isa menyampaikan pertanyaan keingintahuannya mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Dr. H. Marzuki Alie dalam menjalankan amanah kepemimpinan AIPA ke-33 dalam periode September 2011-September 2012.

Dr. H. Marzuki Alie menjelaskan mengenai perlunya diadakan pertemuan *Executive Committee* AIPA tiga bulan sebelum diadakannya Sidang Majelis Umum AIPA. Hal ini dimaksudkan untuk memiliki waktu yang memadai guna mematangkan berbagai agenda dan isu yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA berikutnya. Di samping itu, mantan Presiden AIPA ke-33 Dr. H. Marzuki Alie menjelaskan mengenai pentingnya melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara ASEAN dalam kerangka amanah kepemimpinan AIPA, yakni Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Myanmar, yang dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih erat di antara para pemimpin parlemen, dan negara-negara ASEAN.

Hal lain yang menjadi perhatian Ketua DPR-RI dalam pertemuan dengan Delegasi Parlemen Brunei Darussalam tersebut adalah mengenai agenda Pertemuan KTT ASEAN tahun ini (April 2013) yang akan diseleng-

garakan di Bandar Sri Begawan-Brunei Darussalam. Ketua DPR-RI mengharapkan adanya kesempatan *preliminary meeting* (pertemuan awal) di antara ketua-ketua parlemen ASEAN, guna mematangkan berbagai isu dan pandangan yang akan disampaikan di dalam pertemuan KTT ASEAN tersebut. Ketua DPR-RI menyampaikan harapan agar kiranya Parlemen Brunei Darussalam dapat membantu terwujudnya kesempatan pertemuan tersebut. Ketua DPR-RI berharap kunjungan Parlemen Brunei Darussalam ke DPR-RI akan mengangkat kembali dan memperkuat semangat membangun keakraban di antara kedua parlemen dan kedua negara di masa-masa yang akan datang.

Berkaitan dengan agenda peralihan kepemimpinan dalam organisasi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang diselenggarakan pada hari Senin, 4 Februari 2013, Ketua DPR RI bersama H.E. Haji Awang Isa bin Pehin Haji Awang Isa bin Pehin Dato Perdana Menteri Dato Laila Haji Awang Ibrahim turut menyaksikan proses “handing over” jabatan Sekretaris Jenderal AIPA dari sekjen AIPA yang lama, Hon. Antonio Cuenco dari Filipina, kepada Sekjen AIPA yang baru Hon. Periowsamy Otharam dari Singapura. Beberapa hal strategis yang menjadi *highlighting* dari Sekjen AIPA yang lama, Hon. Antonio Cuenco, adalah; kebutuhan untuk mengimplementasikan berbagai resolusi yang dihasilkan oleh AIPA, yang saat ini organisasi AIPA telah mengeluarkan lebih dari 700 resolusi, dan semuanya membutuhkan implementasi konkret di tingkat eksekutif. Untuk itu, dibutuhkan penambahan SDM agar mampu mendorong pelaksanaan resolusi ke tingkat yang lebih konkret.

Dalam bagian sambutannya, Sekjen AIPA yang baru, Hon. Periowsamy Otharam, menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya; melanjutkan dan meningkatkan transparansi dari berbagai hal dalam organisasi AIPA, dan mengembangkan media komunikasi AIPA melalui website, newsletter, dan media komunikasi lain.**

Komisi IV : Tata Kelola Buruk Sebabkan Harga Daging Tinggi

Anggota Komisi IV DPR RI mengharapkan Pemerintah memperbaiki mekanisme dan tata kelola daging. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada regulasi yang serius untuk itu dan tata kelola daging buruk.

Demikian ditegaskan anggota Komisi IV DPR Honing Sanny di Jakarta, Selasa (5/2) menanggapi, mahalnya daging sapi di Indonesia dan saat ini adalah yang paling mahal di ASEAN, rata-ratanya mencapai Rp 85.000-Rp 90.000/kg.

Honing Sanny menjelaskan Komisi IV telah membentuk Panja Daging. Menurutnya semua yang berkaitan dengan pangan harus ada tanggung jawab interdepartemen, sedangkan interdepartemen masih mengalami kesulitan koordinasi.

Dia memisalkan satu komisi tidak dapat mengontrol dari sisi operasional kebijakan yang berkaitan dengan pangan, karena Kementerian Pertanian pasti berdalih bukan hanya tanggungjawabnya, tetapi juga Ke-



Anggota Komisi IV DPR Honing Sanny.

menterian Perdagangan. “Perlu adanya koordinasi yang baik antar kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam memperbaiki tata kelola daging,” Tegas Politisi Partai

ganya menjadi mahal,” katanya.

Hal senada disampaikan, Anggota Komisi IV Anton Sihombing, memang telah salah tata kelola yang menyebabkan tingginya harga daging. Dia mengatakan bahwa Pemerintah menyampaikan sapi banyak di masyarakat. “Kalau sapi banyak di masyarakat, tidak mungkin harga sapi naik,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Anton menengarai adanya spekulasi sapi hidup dan daging sapi. Impor daging dikurangi yang sekarang sebesar 80 ribu Ton tetapi tetap harga naik. “Berarti ada spekulasi, jadi pemerintah harus jujur berapa stok ternak yang ada di masyarakat. Jangan memperkirakan,” katanya. (as), foto : iwan a/parle/hr.

Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Salah satu penyebab tingginya harga daging yaitu ketidakseimbangan antara permintaan dan suplai. Permintaan terhadap daging dari kota-kota besar di berbagai daerah Nusantara sangat tinggi, sedangkan pasokan dalam negeri langka.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus memperkuat peternakan dalam negeri, tetapi jika pola konsumsi masih tinggi mau-tidak mau harus mengimpor. “Impor dengan batas jumlah tertentu dalam jangka pendek masih dapat dipahami,” tambahnya.

Namun dia mengherankan masih tingginya harga daging. “Di banyak tempat dan di banyak negara, impor itu adalah pilihan tetapi tidak mahal, berarti mekanisme impornya yang salah. Ada keuntungan dari pengimpor yang terlalu besar, sehingga dipasaran har-



Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing.

Komisi IV DPR Terima Pengaduan Apdasi Terkait Impor Daging Sapi

Komisi IV menerima pengaduan dari Ketua Asosiasi Pedagang Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) Jawa Barat, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (7/2). Mereka meminta DPR mendesak pemerintah untuk menurunkan harga sapi potong, mencabut kebijakan pembelian sapi lokal sebesar 10 persen oleh pengusaha besar, dan melaksanakan Import Sapi Trading.

Kepada Komisi IV DPR RI, Ketua Umum APDASI Jawa Barat Dadang Iskandar menyebutkan, harga daging sapi yang melambung tinggi di pasaran yaitu berkisar 90 ribu sampai seratus ribu per kilogramnya merupakan akibat dari diperbolehkannya para pengusaha besar yang menjadi importir daging sapi untuk membeli



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo menerima pengaduan Asosiasi Pedagang Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI).

sapi lokal. APDASI menduga para importir tersebut memainkan harga daging di pasaran atau dengan kata lain memonopoli pasar.

“Para Importir bisa membeli sapi lokal dengan harga yang lebih tinggi dibanding kami, para pedagang daging dan sapi dengan modal tidak besar. Dan mereka seandainya memainkan harga pasar. Akibatnya banyak sekitar empat puluh persen dari pengusaha daging sapi di Jawa Barat yang gulung tikar. Di dalamnya ada pemotong, bandar, supplier, pengecer akan terancam manggurr,” ujar Dadang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron yang memimpin pertemuan mengatakan, penyerapan sapi lokal sebanyak sepuluh persen oleh pengusaha atau importir merupakan hal



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

yang positif untuk mengantisipasi kekurangan *supply* daging sapi di pasaran.

“Kalau Importir tidak menyerap sapi lokal sebanyak sepuluh persen, mereka nanti bisa mengata-

kan bahwa *supply* daging tidak mencukupi kebutuhan atau *demand* pasar, yang akhirnya mereka meminta jatah atau kuota daging impor ditambah. Jika ini terjadi malah akan merugikan peternak dan pedagang kecil,” jelas anggota Komisi IV dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi.

Sependapat dengan Yoga, para anggota Komisi IV lainnya pun menganggap bahwa tuntutan APDASI untuk mencabut kebijakan pembelian sapi lokal sebesar sepuluh persen oleh pengusaha besar itu adalah langkah yang kurang tepat. Terlebih lagi dengan tuntutan ketiganya untuk melaksanakan import sapi trading untuk normalisasi harga daging sapi potong di pasaran. Karena menurut Herman, selama ini pemerintah membatasi berat sapi potong import sebesar 350 kg per satu ekor sapi. Sementara sapi trading beratnya bisa mencapai lebih dari 350 kg per satu ekor sapi.

“Kalau bisa kita malah jangan sampai impor sapi potong. Makanya kita sangat mendukung rencana pemerintah untuk swasembada daging,” ucap Herman.

Meski demikian para anggota Komisi IV DPR RI sependapat dengan ADAPSI untuk menurunkan harga daging sapi di pasaran agar terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun kata Herman, harus terlebih dahulu dibicarakan dengan para pihak terkait, seperti Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. (ayu) Foto: wy/parle.

DPR Minta Pemerintah Sampaikan Perkembangan RUU ASN Secara Utuh Ke Presiden

Ketua Komisi II DPR meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB sampaikan perkembangan pembahasan secara utuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR 15 Februari nanti dan Sidang Kabinet.

“Saya meminta pemerintah menyampaikan substansi lampiran secara utuh dari perkembangan pembahasannya, kronologis, tuntutan, serta kesepakatan dalam membahas RUU ASN kepada Presiden, agar dijadikan bahan masukan saat Rapat Konsultasi dengan pimpinan Dewan,” kata Agun saat RDP Panja RUU ASN dengan Sesmen PAN-RB Tasdik Kinanto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/2).

Agun menambahkan, bahwa dalam rapat konsultasi itu, sebelumnya Komisi II DPR sudah mengusulkan satu agenda kepada pimpinan DPR yang akan



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berdialog dengan Sesmen PAN-RB Tasdik Kinanto.



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

dibicarakan dalam rapat konsultasi tersebut yaitu mengenai RUU ASN, alasannya RUU ASN telah mengalami penundaan 4 (empat) kali masa sidang.

“Kami juga sudah memberikan informasi kepada pimpinan dewan, agar dalam rapat konsultasi tersebut supaya dipertegas mengenai RUU ASN ini, terlebih lagi sudah ada keputusan mengikat antara Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB untuk bisa diselesaikan dan

lam masa sidang ini,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Hal senada dikatakan anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno, ia meminta pemerintah menginformasikan secara lengkap kepada presiden mengenai sikap DPR dan pemerintah mengenai RUU ASN ini, dan jangan sampai dihadapan presiden hanya disampaikan padangan pemerintah saja tanpa melihat bagaimana padangan dari DPR.

“Harus ada informasi yang lengkap kepada Presiden, jangan hanya informasi sepihak sehingga nantinya tidak akan ada titik temu, dan ini mohon disampaikan,” tegas Gamari.

Menanggapi hal tersebut, Sesmen PAN-RB Tasdik Kinanto berterima kasih atas masukan, saran dan pendapat dari anggota dewan.

“Seperti yang sudah kami informasikan bahwa Kemen PAN-RB dan Menkopolkum telah melaku-



Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno.

kan usulan tersebut kepada bapak Presiden, dan harapan serta doa kami dalam waktu dekat sidang kabinet untuk membahas RUU ASN, serta ditambah dengan RUU Administrasi Pemerintahan akan dilaksanakan, dan kami sudah menyiapkan bahan-bahan untuk ke dua RUU tersebut kepada Presiden supaya bisa diputuskan lebih cepat,” jelas Tasdik. (nt) Foto: wy/parle.

Komisi X DPR Desak Klub Sepakbola Tak Miliki Finansial Cukup Dibubarkan

Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar mendesak agar klub-klub sepakbola yang tidak memiliki finansial yang cukup, lebih baik dibubarkan saja. Adanya klub sepak bola yang belum membayar gaji berarti sudah menindas pemainnya.

Hal itu ditegaskan Dedi ketika mengadakan audiensi dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, klub sepak bola yang menunggak pembayaran gaji, berarti menelantarkan aspek kemanusiaan. Bahkan sudah merenggut kesejahteraan pemain sepakbola yang sudah berjuang membela timnas. Klub juga sudah menyalahi hukum dan nilai kemanusiaan.



Anggota Komisi X DPR Dedi S. Gumelar.

Terkait dengan rapat yang membahas permasalahan administrasi antara klub dengan pemainnya ini, Komisi X berjanji akan serius menangani laporan dari APPI ini. Bahkan, Komisi X DPR akan mengundang pihak terkait agar masalah ini tak berlarut-larut seperti Kemenpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

“Tentu akan kami tangani secara serius. Sebelum APPI melaporkan hal ini, dalam raker dengan Menpora beberapa waktu yang lalu, kami sudah menyampaikan masalah ini dengan Pak Menteri Roy Suryo. Dan akan kami sampaikan hasil rapat dengan APPI ini kepada Menpora pada Raker 12 Februari nanti,” ujar anggota Komisi X Zulfadhli yang memimpin rapat ini.

Anggota Komisi X Oelfah A. Syahrullah Harman-tobahkan mengusulkan agar liga-liga yang masih mengizinkan klub sepakbola bermasalah itu dipendam. Ia juga menyarankan agar klub-klub bermasalah dipanggil ke Dewan.

Dalam kesempatan audiensi ini, General Manajer APPI Valentino Simanjuntak meminta bantuan kepada Komisi X DPR RI untuk membenahi dunia sepakbola Indonesia. APPI menuntut agar klub-klub sepakbola menyelesaikan administrasi dengan para pemainnya.

Valentino berharap liga sepakbola di Indonesia seperti Superliga Indonesia (ISL) dan Liga Prima Indonesia (IPL) tidak mengizinkan klub-klub yang bermasalah untuk mengikuti liganya. Untuk itu, APPI pun sudah menyurati operator liga (penyelenggara liga) agar mempertimbangkan klub-klub yang akan berlaga di gelaran liga mereka.

“Yang kami tuntut bukan fasilitas mewah ataupun halaneh-aneh seperti di luar negeri. Kami hanya menuntut hak dasar yang sudah jelas tertera di kontrak. Kami sangat berharap Komisi X dapat membantu pe-

main-pemain yang belum mendapatkan gaji dari klubnya,” harap Valentino, yang hadir bersama pemain timnas Indonesia sekaligus Wakil Presiden APPI Bambang Pamungkas. (mp, sf) Foto: od/parle.



Anggota Komisi X Oelfah A. Syahrullah Harman.

BAKN DPR Minta Kejelasan Anggaran Vaksin Flu Burung

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPRRI meminta penjelasan menyangkut penggunaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Pasalnya, anggaran yang direncanakan *multiyears* tersebut, ternyata dihentikan oleh Kementerian Keuan-

gan.

Ketua BAKN Sumaryati Arjoso menyampaikan pihaknya banyak menemui kesalahan penggunaan anggaran tersebut saat mendengarkan pemaparan dari BPK sebelumnya.

“DPR mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih jelas persoalan ini, karena pembahasannya ada di Komisi IX dan Badan Anggaran DPR RI dengan tegas meminta agar Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan penggunaan anggaran ini dengan se-jelas-jelasnya, karena menyangkut kredibilitas institusi dan lembaga,” tegasnya.

Dia kembali menegaskan, harus ada pelurusan tentang wabah endemik flu burung di Indonesia. Karena disinyalir, bencana flu burung di Indonesia paling ganas



Anggota BAKN Kamarudin Syam.

di dunia. “Kita harus melihat konteksnya, mungkin selama ini cara penanganannya saja yang tidak benar, bukan ganas. Padahal, bila ditangani dengan baik semuanya menjadi lebih mudah. Stigma paling ganas pun bisa diluruskan,” ujarnya.

Sementara Anggota BAKN DPR



Ketua BAKN Sumaryati Arjoso.

Kamarudin Sjam menegaskan, semua temuan BPK soal penyimpangan anggaran, ternyata sumbernya adalah kesalahan perencanaan saja. Hampir semua proyek

pengadaan yang bermasalah selalu salah di perencanaan, sehingga proyek dihentikan karena banyak kebocoran anggaran. “Kualitas Pengguna Anggaran harus be-

rani memutuskan. Jangan mau diintervensi oleh berbagai kepentingan,” terangnya. (MH) Foto: doc/parle.

Komisi VI DPR Serap Aspirasi Industri Otomotif Nasional



Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI) memberikan masukan terkait RUU Perindustrian.

RUU Perindustrian merupakan perubahan atas UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang sudah tidak lagi mampu menampung perkembangan industri modern sehingga perlu disusun UU Perindustrian yang baru dan lebih komprehensif.

“UU tersebut sudah tidak lagi bisa menampung perkembangan industri modern, sehingga perlu dibuatkan UU perindustrian yang



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

baru dan komprehensif, dalam UU yang lama ada 12 bab dan 32 pasal. Sementara dalam RUU ini ada 14 bab

dan 95 pasal,” ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis, (7/2).

Pada kesempatan kali ini, Komisi VI DPR RI mengundang asosiasi industri otomotif dan alat berat nasional untuk mendapat banyak masukan dari kalangan industri dalam negeri agar RUU Perindustrian yang sedang dibahas menjadi lebih komprehensif. Terdapat tiga asosiasi yang diundang oleh DPR yaitu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI).

Menurut Airlangga, RUU ini nantinya akan banyak berpengaruh terhadap industri otomotif nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia. Di hadapan para pemimpin 3 asosiasi, Airlangga mengatakan aturan main soal *outsourcing* juga perlu diluruskan kembali di dunia industri karena menyangkut produktifitas kerja industri.

Sementara itu Anggota Komisi VI Ida Ria (FPD) menyoroti soal kebutuhan energi untuk industri Tanah Air. Seperti diketahui, dunia industri menyerap energi terbesar di Indonesia, sehingga harus dipikirkan ketersediaannya untuk kelangsungan industri itu sendiri.

Sebelumnya baik API, GAIKINDO, maupun HIMABI telah memberikan masukan yang lengkap kepada Komisi VI agar kepentingan dunia industri ditampung dalam RUU Perindustrian tersebut. API mengharapkan RUU tersebut tidak menambah beban bagi industri dalam negeri.

GAIKINDO mengusulkan agar ada peningkatan daya saing, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari pusat bahan baku, pusat pengolahan, sampai pusat pemasaran. Selain itu, pasokan energi untuk industri dalam negeri berupa listrik dan gas harus mendapat jaminan yang jelas. (mh/si) /foto:iwan armanias/parle.



Anggota Komisi VI DPR Ida Ria Simamora.

DPR Sosialisasikan Misi Apec 2013 ke Parlemen Negara-negara Asia Pasifik



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Kesempatan bertemu dengan institusi legislative tidak disia-siakan DPR RI untuk mengungkapkan peran kepemimpinan Indonesia dalam APEC 2013 yang mengusung tema *Resilient Asia Pacific: Engine of Global Growth*.

Dalam pertemuan tersebut Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dr. Pramono Anung Wibowo, MM dengan anggota Dr. KH. Surahman Hidayat, MA (Ketua BKSAP/F-PKS), didampingi Wakil Sidharto Danusubroto (PDIP), H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH (F-PAN), Ir. H. Azam Natawijana serta anggota BKSAP Ir. Idris Sugeng, M.Sc (F-PD), Dody Reza Alex Noerdin, Lic. Econ, MBA (F-PG), Drs. H. Muchtar Amma, MM (F-P Hanura) dan Drs. H. Hasrul Azwar, MM (Fraksi PPP).

Pertemuan tersebut mengumpulkan 349 peserta dari 20 negara, 1 negara pengamat, dua Negara dan organisasi regional/internasional sebagai tamu khusus. Delegasi Indonesia menyosialisasikan bahwa APEC

DPR RI mensosialisasikan misi keketuaan Indonesia dalam APEC 2013 keseluruhan parlemen negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui acara 21st Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang digelar sejak 27 hingga 31 Januari 2013 di Vladivostok, Russia.

2013 digelar di Indonesia dengan rangkaian berbagai kegiatan yang terbagi dalam tiga prioritas yakni *Attaining the Bogor Goals, Sustainable Growth with Equity, Promoting Connectivity*.

“Keberpihakan pada UMKM juga perlu untuk dikampanyekan terus di level Asia Pasifik. Sehingga tujuan *Sustainable Growth with Equity* dapat terwujud. UMKM juga perlu dekat dengan inovasi, sehingga dalam forum itu kita juga mempromosikan keunggulan-keunggulan lembaga riset kita yang diakui oleh *World Rank Research Centers*,” ungkap Pramono Anung.

APPF ke-21 tersebut juga membicarakan berbagai topik diskusi yang terbagi dalam tiga tema yakni Politik Keamanan Asia Pasifik, Ekonomi dan Perdagangan Asia Pasifik, dan Kerjasama regional. Terkait dengan perkembangan situasi politik dan keamanan, Pramono Anung mengungkapkan Asia Pasifik perlu menyambut dengan tangan terbuka transisi politik serta suksesi kekuasaan yang berlangsung di Jepang, China, Korea Selatan dan Korea Utara.

Terutama dengan beragamnya tantangan-tantangan keamanan dan stabilitas teritorial yang muncul di kawasan tersebut seperti: isu Laut China Selatan hingga nuklir Korea Utara. “Indonesia menyerukan kepada seluruh negara yang terlibat dalam sengketa, baik secara teritorial atau sejarah tertentu untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan atau unjuk kekuatan demi stabilitas kawasan,” seru Pramono.

Dalam forum tersebut, lima draf resolusi usulan Indonesia terkait Proses Perdamaian di Timur Tengah, Ketahanan Pangan, Diplomasi Parlemen, Dialog antar peradaban/kebudayaan/agama, dan pemberantasan terhadap terorisme, perdagangan obat dan kejahatan transnasional terorganisir diadopsi menjadi bagian dari 14 resolusi APPF ke-21. (mp)/foto: iwan armanias/parle.

Kualitas Anggota DPR Pengaruhi Produk Legislasi

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono menjelaskan bahwa kualitas anggota DPR sangat mempengaruhi produk legislasi yang dihasilkan DPR. Tanpa anggota DPR yang berkualitas tidak mungkin DPR mampu menghasilkan produk Undang-undang sesuai target prolegnas dan apa yang diharapkan masyarakat.

“Kaitan kualitas dan kuantitas itu dapat tercapai apabila unsur yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang (UU) memenuhi kualitas yang dibutuhkan,” ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono dalam Forum Legislasi di Gedung DPR Jakarta, Selasa, (5/2).



Katua Baleg Ignatius Mulyono didampingi Ketua Wartawan Koordinatoriat DPR Jaka dan Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri dalam Forum Legislasi.

Selain itu Ignatius memaparkan bahwa dalam pembahasan UU tersebut DPR telah melibatkan semua pihak, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Selama ini sudah melibatkan para pakar, akademisi, LSM, profesional, fraksi-fraksi DPR, dan pemerintah” tegas Ignatius.

Ignatius berharap agar Pemerintah dan DPR RI dapat segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang JPSK, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket tentang Pengusutan kasus Bank Century yang sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

Dalam forum yang sama Direktur Advokasi dan

Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menegaskan bahwa target prolegnas dapat tercapai apabila unsur-unsur dalam perencanaan penyusunan Undang-undang terpenuhi yaitu struktur organisasi, jadwal kerja, dan pasangan kerja. “Selama ini yang menjadi akar masalah minimnya kualitas, dan kuantitas UU yang dihasilkan adalah karena bermasalahnya desain dari program legislasi nasional (Proglenas) itu sendiri,” katanya.

Ronald juga menambahkan bahwa latar belakang anggota DPR RI memang seluruhnya bukan cendekiawan, dan tidak didesain untuk memproduksi UU, yang penting ada keberpihakan kepada rakyat, bangsa, dan negara. “Yang penting dari DPR itu ada keberpihakan pada rakyat. Itu konsekuensi sebagai wakil rakyat. Pada prinsipnya, perlu pembenahan dari hulu ke hilir,” tutur Ronald. (wy)foto:wy/parle.

Komisi VIII Minta Masukan Terkait Pengelolaan Dana Haji

Komisi VIII DPR RI meminta masukan dari berbagai pihak diantaranya dari Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan mengelola dana haji.

Selama ini, Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) yang berasal dari sisa biaya operasional penyelenggaraan haji ini dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dibawah Kementerian Agama. Namun hingga saat ini Komisi VIII DPR belum mendapatkan jumlah yang pasti tentang dana dan dari kapan jumlah tersebut terkumpul.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII

DPR H Gondo Radityo Gambiro, Rabu (6/2), Komisi VIII meyakini bahwa pengelolaan dana atau keuangan haji harus dilakukan secara profesional dan harus dijalankan secara hati-hati, jangan sampai ada ruang sekecil apapun untuk merugikan umat.

Karena itu, Komisi VIII DPR berencana untuk membentuk sebuah badan hukum sendiri yang dinamakan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk mewujudkan rencananya tersebut, Komisi VIII DPR RI perlu meminta masukan dari berbagai pihak diantaranya Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Pada kesempatan tersebut, Deputy Gubernur BI yang



Jajaran Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR.

diwakili Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edy Setiadi mengakui bahwa pengelolaan dana haji harus berlandaskan pada prinsip-prinsip independensi, transparansi, profesional dan amanah sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi calon jemaah haji.

Untuk itu, Edy menyetujui rencana Komisi VIII membuat Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana haji.



Anggota Komisi VIII DPR Abdul Azis Suseno.

Perlu Badan Khusus

Hal yang sama juga disampaikan Askolani yang mewakili Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Askolani berpendapat sangat diperlukan sebuah badan hukum

khusus untuk pengelolaan keuangan haji. Namun, katanya, badan hukum tersebut diluar satuan kerja (satker) pemerintah.

Dengan kata lain, pengelolaan dana haji harus terpisah dari Kementerian Agama seperti yang selama ini berlangsung. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh ASKES dan TASPEN untuk mengelola dana kesehatan dan pensiun.

Selain itu, Dana Haji merupakan dana titipan masyarakat dan bukan bersumber dari APBN atau aset pemerintah, oleh karena itu harus dipisahkan dari satker pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mencegah pemerintah terkena dampak langsung dari kegagalan pengelolaan keuangan haji dan resiko ekonomi makro.

Menanggapi hal itu, sebagian besar anggota Komisi VIII mendukung masukan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk membentuk sebuah badan di luar pemerintah yang khusus mengelola keuangan haji. (Ayu) foto:RY/parle

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Apresiasi Perjuangan Buruh

Usai berdemonstrasi secara besar-besaran di Istana Negara dan DPR RI, para utusan buruh menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Ruang Rapat Pimpinan Gedung DPR Senayan, Jakarta Rabu sore (6/2). Sebelas orang para pemimpin organisasi buruh menyampaikan pandangan dan tuntutan secara detail dan argumentatif. Tuntutan yang dikemukakan lebih banyak menyoal kesejahteraan, tidak saja bagi para buruh, tapi juga masyarakat luas.

Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memaparkan tuntutan dan harapannya dengan konprehensif. Tiga hal penting yang menjadi tuntutan-

nya adalah merealisasikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2014. Dua tuntutan lainnya menyangkut jaminan pensiun yang harus direalisasikan pada 1 juli 2015 dan soal upah layak yang menyangkut 84 komponen.

Semua tuntutan ini sebenarnya sedang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPPres) yang sampai saat ini belum rampung. Disampaikan pula oleh Iqbal bahwa organisasi buruh menolak RUU Kamnas yang kini sedang dibahas, karena pasti akan menyingkirkan kepentingan buruh.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima perwakilan buruh.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Mudhofir menyoal seputar pengangkatan dua utusan buruh yang menjadi komisaris di PT Jamsostek. Pengangkatan itu dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, sangat ironis dua orang utusan buruh yang selama ini menyuarakan anti-Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), justru mengamankan BPJS. Padahal, semua organisasi buruh tentu anti BPJS.

Perlu ada klarifikasi yang jelas menyangkut utusan buruh yang ada di jajaran komisaris PT Jamsostek. Kalau pun mau mengangkat buruh menjadi komisaris, harus dicari yang justru mendukung BPJS. Menurut Mudhofir, PT Jamsostek juga perlu diaudit, karena asetnya sudah mencapai Rp160 triliun.

Priyo Budi Santoso yang menyimak penuturan para delegasi buruh tersebut, langsung mengapresiasi de-

ngan baik. “Saya sangat gembira dengan kehadiran para presiden buruh ini, karena penjelasannya cukup detail,” ungkapnya. Priyo juga mengapresiasi aksi buruh kali ini yang tertib, tidak merusak areal kompleks gedung parlemen.

Menyoal RUU Kamnas yang dipersoalkan para buruh, Priyo mengatakan ada implikasi yang sangat luas, memang, dalam pembahasan RUU ini. Semua pihak yang turut membahas RUU tersebut punya argumentasi yang sama kuat dan benar. Jadi masih ada tarik ulur dalam merumuskannya.

Pada bagian akhir pertemuan itu, Priyo sekali lagi memuji para utusan buruh yang datang menemuinya. Dia mengatakan, pertemuan ini sangat bermanfaat bagi perjuangan para buruh itu sendiri maupun beragam organisasi buruh yang terus menyuarakan aspirasi para buruh. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

RUU P3L Optimis Selesai April Mendatang



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Ketua Panja RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) Firman Subagyo mengaku optimis RUU P3L akan segera diketok pada bulan April 2013 ini.

“RUU P3L ini meskipun sempat diperpanjang 6 kali masa sidang, namun spiritnya tidak pernah bergeser harus segera dituntaskan karena memang saat ini kita merasa prihatin maraknya kerusakan hutan yang luar biasa saat ini,” ujarnya kepada Parleментарia, di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (6/2).

Menurut Firman, Panja sempat mengalami deadlock pada beberapa Bab di RUU tersebut, diantaranya Bab V dengan 35 Daftar Inventaris Masalah (DIM), Bab II Ketentuan umum terkait judul, Bab IV Pemberantasan Kerusakan hutan, Bab VIII Pembiayaan, IX soal Pidana, dan Bab X Peralihan serta Bab XI Penutup.

“Jadi persoalan deadlock telah selesai pada tingkat Panja dan akan masuk pada tingkat Tim Perumus (Timus),” ujarnya.

Khusus mengenai Bab V Kelembagaan, lanjutnya, selain memiliki fungsi atau peran yang represif dalam memberantas pembalakan liar, RUU ini juga mengedepankan fungsi yang restoratif. “Dalam RUU ini kita membahas masalah DIM yang agak krusial yaitu yang mengatur kewenangan didalam kelembagaan, dimana prinsipnya melibatkan unsur kehutanan, kepolisian dan kejaksaan agung, ditambah juga unsur pakar kehutanan dan hukum acara pidana,” katanya.

Dia menambahkan, RUU P3L menerapkan sanksi pidana dan denda yang berat bagi para pelaku atau perusahaan yang terbukti melakukan pembalakan hutan ilegal. “Memang selama ini dalam UU

No. 41 tahun 2009 masih belum dapat menjangkau aktor yang tidak tersentuh,” ujarnya.

Dia mengharapkan, aparat pemerintah dapat menjalankan RUU P3L ini secara konsisten. “Perusakan

hutan terutama yaitu pemberian ijin yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, baik dari sisi penegakan hukumnya dan pengawasan pihak kehutanan yang masih minim,” tambahnya.(si)/foto: iwan armanias / parle

Komisi I Minta TNI Perhatikan Elemen Penting Pengadaan Alutsista



Raker Komisi I dipimpin Ketua Mahfudz Sidiq dengan Panglima TNI Agus Suhartono.

Komisi I meminta TNI memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam setiap pengadaan Alutsista agar memiliki daya gentar (*deterrence affect*) yang maksimal.

Komisi I DPR RI menilai ada berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. “TNI agar konsisten menjalankan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai memimpin rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Suhartono membahas pertanggungjawaban anggaran TNI 2012 dan rencana kerja 2013, di Gedung DPR, Selasa (5/2).

Selain itu, Komisi I mendukung pengalokasian kembali pengadaan Alutsista bagi TNI AL yang sebelumnya sudah diajukan pada APBN-P 2012 namun belum terealisasi. Alutsista yang dimaksud berupa sepaket enkripsi, seperangkat alat komunikasi taktis, dan 135 unit alat selam. “Panglima TNI menjelaskan bahwa anggaran optimalisasi TNI 2012 sebesar Rp 678 miliar, realitanya hingga tutup buku tahun lalu, tidak kunjung bisa cair. Sementara program-program yang sudah diajukan di Komisi I itu penting dan perlu segera direalisasikan,”

kata Mahfudz.

Terkait dengan sengketa tanah, Komisi I mendesak TNI dan pihak terkait untuk melaksanakan moratorium konflik tanah dengan masyarakat, Komisi I berharap TNI mengedepankan musyawarah jika bersengketa soal tanah dengan masyarakat. “Sengketa tanah yang dihadapi TNI selanjutnya akan dibahas bersama Kemenhan, Kemenkeu, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain di Panja Tanah Komisi I DPR RI,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan Tahun 2012, anggaran TNI Rp 54,21 triliun. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau terserap 98,75 persen. Terdiri dari belanja untuk pegawai dengan pagu anggaran Rp 34,37 triliun, terserap 100 persen. Lalu, belanja barang dengan pagu anggaran Rp 10,16 triliun, terserap 100 persen. Dan, belanja modal dengan pagu anggaran Rp 9,67 triliun telah terealisasi Rp 8,98 triliun atau terserap 92,98 persen.

“Sisa anggaran sebesar Rp 678 miliar, merupakan anggaran belanja modal bersyarat yang masih berada ke Kemenkeu. Terdiri dari Rp 480 miliar untuk pengadaan alat komunikasi Mabes TNI dan Rp 198 miliar untuk pengadaan alat selam TNI AL. Hingga saat ini

belum ada kejelasannya dari Kemenkeu maupun hasil preaudit dari BPKP,” ujar Agus Suhartono.

Dengan demikian, kata Panglima TNI, daya serap anggaran TNI tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 54,21 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau 98,75 persen.

Selanjutnya Panglima TNI pun menjelaskan, anggaran TNI di 2013 masih akan difokuskan pada program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Hal ini merupakan jabaran dari renstra tahap II 2010-2014 dan dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2010-2024 (jangka menengah). Sesuai pagu definitif DIPA 2013, TNI mendapat alokasi anggaran Rp 58,93 triliun. Rinciannya, unit organisasi Mabes TNI dengan alokasi anggaran Rp 6,51 triliun akan digunakan untuk program penggunaan kekuatan pertahanan integratif Rp 1,78 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista Rp 1,26 triliun, program peningkatan profesionalisme integratif prajurit TNI Rp 309,52 miliar, pro-

gram penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Rp 3,15 triliun.

Pada unit organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, alokasi anggaran Rp 52,41 triliun dengan rincian, untuk program dukungan kegiatan kesiapan matra Rp 2,33 triliun. TNI AD Rp 946,47 miliar, TNI AL Rp 763,85 miliar, dan TNI AU Rp 624,39 miliar.

Untuk program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana matra Rp 9,38 triliun. Rinciannya, TNI AD Rp 3,44 triliun, TNI AL Rp 2,08 triliun, dan TNI AU Rp 3,85 triliun. Sementara, untuk program profesionalisme personel matra sebesar Rp 1,70 triliun, terdiri dari TNI AD Rp 919,14 miliar, TNI AL Rp 319,83 miliar, dan TNI AU Rp 466,91 miliar. Sedangkan program manajemen dan operasional matra sebesar Rp 38,99 triliun dengan rincian TNI AD Rp 28,15 triliun, TNI AL Rp 7 triliun, dan TNI AU Rp 3,83 triliun. (as), foto : wy/parle/hr.

Komisi IX Desak Kemenkes Selesaikan Masalah Kepesertaan Jamkesmas



Rapat Komisi IX DPR dengan Wakil Menteri Kesehatan dan jajarannya.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) segera melakukan verifikasi dan menyelesaikan permasalahan kepesertaan serta pendataan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufhron Mukti, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Rasiyo, dan Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiro Sancoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/1)

“Sebagai tindak lanjut hasil rapat hari ini, Kementerian Kesehatan diminta untuk melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan Jamkesmas sebagai per-

siapan pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 2014,” kata Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno yang memimpin rapat tersebut.

Dalam rapat yang membahas mengenai Mekanisme penetapan data kepesertaan Jamkesmas 2013, Komisi IX juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan dan pemanfaatan Jamkesmas 2013 sebagai upaya optimalisasi cakupan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat sangat miskin, miskin dan rawan miskin lainnya.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno.

Untuk mengantisipasi dalam hal pencetakan dan pendistribusian kartu Jamkesmas, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi dan mengawasi pencetakan dan pendistribusian kartu Jamkesmas 2013 di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) sehingga permasalahan seperti yang terjadi di provinsi Jawa Timur dapat segera diatasi. (sc)foto:wy/parle.

Paripurna Setujui 8 Hakim Agung Terpilih



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bersama 8 Hakim Agung terpilih.

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan 24 calon hakim agung dalam rapat paripurna. Ia menjelaskan dari 2 periode tahapan seleksi telah berhasil dipilih 8 kandidat yang diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara.

“Laporan hasil seleksi calon hakim agung ini disampaikan untuk ditetapkan dalam sidang paripurna DPR dan selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk diangkat menjadi hakim agung,” kata Gede Pasek dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/13).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan ada 4 prasyarat penting yaitu kecakapan, kemampuan, integritas dan moral yang harus dipenuhi kandidat dalam proses seleksi. Diharapkan calon hakim agung terpilih dapat menjadi hakim agung yang mampu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada

masyarakat yang telah memberikan masukan, pandangan, serta kritikan dengan tujuan agar calon hakim agung yang dipilih dapat menjaga kehormatan, ke-luhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada bagian lain Pasek menyampaikan permintaan maaf. “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung calonnya tetapi ternyata tidak terpilih,” kata dia.

Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso pada bagian akhir meminta persetujuan terhadap laporan yang telah disampaikan Komisi III tersebut. “Setuju..,” sahut peserta sidang paripurna diikuti tepuk tangan. Hakim Agung terpilih yang ikut menghadiri rapat paripurna terlihat tersenyum menyambut keputusan yang baru saja diketok.

Berikut nama 8 Hakim Agung terpilih, Hamdi H. 54 suara, M. Syarifuddin 54, I Gusti Agung Sumanatha 52, Irfan Fachrudin 48, Margono H. 47, Burhan Dahlan 43, Desnayeti M. 25 dan Yakup Ginting 23. (iky), foto : wd,iw/parle/hr.

Ketua DPR dan Presiden AIPA Saksikan Serah Terima Sekjen AIPA

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Presiden Asean Parliamentary Assembly (AIPA) Pehin Dato Isa bin Ibrahim, di Lantai III Gedung Nusantara III Senin (4/2) menyaksikan upacara serah terima jabatan Sekjen AIPA dari Antonio Cuenco dari Philipina kepada penggantinya Periowsamy Otharam dari Singapura. Hadir

dalam acara ini beberapa anggota DPR, pejabat Setjen DPR dan undangan lainnya.

Presiden AIPA Pehin Dato Isa bin Ibrahim dalam sambutannya menyatakan penghargaan kepada Sekjen AIPA yang lama dan menyambut baik serta selamat bertugas kepada Sekjen AIPA yang baru. Sekjen AIPA



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyaksikan ucapan selamat Presiden AIPA kepada Sekjen AIPA yang baru.

dijabat selama 3 tahun dan Otharam akan menjabat dari 2013 hingga 2016.

Presiden AIPA mengatakan akan segera menyusun program baru yang akan dilaksanakan dengan meminta masukan dari rekan-rekan sejawat terutama kepada Ketua DPR Marzuki Alie sebagai Presiden AIPA

yang digantikannya. Tentang Sekjen AIPA yang baru dia berharap bisa bekerja sama mengemban tugas-tugas AIPA yang akan datang, apalagi Otharam dicalonkan oleh Parlemen Singapura untuk menjabat Sekjen AIPA yang ketiga.

Menjawab pertanyaan mengenai rencana Sidang AIPA yang akan berlangsung di Brunei Darussalam pada tahun 2013 ini, Pehin Dato Isa menjelaskan berbagai hal sedang dipersiapkan. Selain itu pihaknya menjalin kerja sama parlemen kedua negara, yaitu Badan Perundangan Brunei dari Majelis Permusyawaratan Negara dengan DPR-RI.

Dalam acara tersebut Sekjen AIPA lama Antonio Cuenco menyerahkan buku kenang-kenangan kepada Sekjen AIPA yang baru Periowsamy Otharam dan foto bersama antara Ketua DPR Marzuki Alie, Presiden AIPA Pehin Dato Isa bin Ibrahim serta Sekjen dan mantan Sekjen AIPA. (mp), foto : hindra/parle/hr.

Komisi XI DPR Tunda Persetujuan Privatisasi Semen Baturaja



Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis.

Raker Komisi XI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Direksi Semen Baturaja yang membahas persoalan privatisasi Semen Baturaja akhirnya ditunda keputusannya dalam satu minggu kedepan.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, DPR akan melakukan rapat internal apakah menyetujui

atau tidak persoalan *Initial Public Offering* (IPO) Semen Baturaja. "Dalam seminggu harus bikin keputusan, nanti surat dikirim ke menteri," terangnya.

Nantinya, apapun hasil keputusannya, lanjut Emir, DPR akan mengirimkan keputusan via tertulis kepada pemerintah. Emir mengata-

kan, secara pribadi dirinya sangat mendorong IPO untuk mendorong kinerja BUMN dalam memacu perekonomian negeri. Bahkan dengan IPO, perusahaan pelat merah, bisa mengejar keterbatasan infrastruktur dan transportasi.

"Kalau saya pribadi saya setuju, dalam rapat dengan Kementerian



Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menkeu Agus Martowardojo.



Keuangan waktu itu, bukan Semen Baturaja saja, tetapi Pelindo, Angkasa Pura dan lainnya,” katanya.

Saat ini, Emir menuturkan empat fraksi di Komisi XI setuju dan empat fraksi

menolak IPO Semen Baturaja. Nantinya, kalau tetap tidak ada kesepakatan, akan dilakukan voting. “Kita akan ambil keputusan, kalau enggak kita voting,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Menteri BUMN Dahlan Iskan berdialog dengan Menkeu Agus Martowardojo dan Dirut PT. Semen Batu Raja.

Komisi VI DPR Sambut Baik Penghapusan Utang UMKM di Daerah Bencana

Komisi VI DPR mengapresiasi keputusan penting soal penghapusan utang bagi para pelaku UMKM di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tertimpa musibah gempa bumi 2006. Dalam rapat kerja kilat yang digelar di Gedung Nusantara I DPR, Senin (4/2) itu dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur BI Darmin Nasution, dan sejumlah Direksi Bank BUMN.

Keputusan penting ini tentu sangat diapresiasi tidak saja oleh pemerintah dan DPR, tapi juga oleh para pelaku usaha kecil menengah di Yogyakarta. Airlangga Hartarto usai memimpin rapat mengatakan, hendaknya penghapusan utang ini harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Seperti diketahui, kredit macet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya mencapai 9,403 miliar.

Sebelumnya, memang sudah ada keputusan MK yang mengabulkan permohonan penghapusan piutang di sejumlah bank BUMN atau hapus buku. Dengan demikian bank-bank pemerintah itu sudah terbebas dari piutang kredit mikro. Dan usaha penghapusan utang dari sejumlah pelaku usaha mikro di Yogyakarta dan Jateng sebenarnya sudah lama diajukan. Baru kali ini mendapat restu dari DPR dan juga pemerintah.

“Karena persoalan ini sudah kita

bahas 2 tahun lebih. Sudah banyak keputusan dari komisi. Sudah dilakukan juga kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dari berbagai hal yang dilakukan juga sudah diambil berbagai kesimpulan. Kasusnya tinggal menunggu keputusan daripada pemerintah. Kemarin pemerintah tidak berani memberikan keputusan, karena tidak jelasnya penerjemahan terkait penghapusan tagihan (hapus tagih). Tetapi dengan sudah adanya keluar surat keputusan MK, maka ini sudah disetujui untuk hapus tagihan,” papar Airlangga Hartarto. Supaya UMKM itu semuanya bisa dapat bergerak.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR Prof. Dr. Hendrawan Supratikno mengatakan, masalah penghapusan utang sudah terlalu lama dibahas dan mestinya sudah diselesaikan lebih awal. Pihaknya juga sudah mengadakan kunjungan spesifik dan sudah melihat dampak dari bencana itu terhadap kehidupan UKM di DIY dan Jawa Tengah, seperti Boyolali, Klaten, dan kota-kota lain di Jawa Tengah.

“Kami dalam rapat-rapat selalu mengatakan, masa untuk jumlah uang yang tidak besar ini, negara tidak memiliki kapasitas memberikan solusi secepatnya. Saya harap dalam rapat ini menjadi momentum agar lembaga-lembaga negara memiliki kemampuan, kapasitas, kompetensi untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakat,” ujar Hendrawan.

Namun demikian, penghapusan utang ini harus diteliti lebih lanjut agar tidak salah sasaran atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di balik keputusan penghapusan utang. Dibutuhkan pengawasan terhadap bank dan para pelaku UMKM dalam masalah ini, untuk mencegah penyimpangan keuangan negara.

Sejauh semua didasarkan fakta dan telaah yang tepat tentang kondisi riil di masyarakat, lanjut Hendrawan, UMKM itu tidak ada masalah. Memang keputusan MK itu membuka lubang untuk aji mumpung sehingga terjadi kongkalikong antara debitur dengan pihak pemegang dalam hal ini bank, sehingga perlu dikawal agar keputusan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, jelasnya. (mh,iw)/foto:iwan armanias/parle.



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

Timwas DPR Minta Aparat Penegak Hukum Fokus Pengembalian Aset Bank Century



Jaksa Agung dan Kapolri saat menghadiri rapat dengan Timwas Century DPR.

Tim Pengawas Kasus Bank Century (Timwas) Century DPR mengapresiasi aparat Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengungkap hasil audit BPK dan mendorong untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu aparat penegak hukum diminta untuk fokus meningkatkan upaya mengungkap kasus yang digelapkan, sehingga dapat dialokasikan untuk mengganti dana nasabah Antaboga Delta Sekuritas.

Demikian kesimpulan rapat kerja Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dengan Kapolri Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrif Arief yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Rabu (2) sore.

Dalam kesempatan ini Kapolri menjelaskan progress report perkembangan penanganan perkara yang dilakukan Polri hingga kini sebanyak 12 laporan. Jumlah perkara yang diproses penyidikan sebanyak 41 berkas dan jumlah tersangka yang semula 36 orang bertambah sehingga menjadi 40 orang.

Menurut Timur Pradopo kasus-kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal antara penipuan dan penggelapan terhadap uang nasabah Reksa Dana PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang ada di Bank Century yang melibatkan Robert Tantular dan pihak-pihak di luar Bank Century.

Jumlah perkara yang sudah dikatakan lengkap oleh Jaksa penuntut mengalami penambahan lima berkas perkara. Secara keseluruhan yang telah diselesaikan Polri penyidikannya adalah 30 berkas dengan perin-

cian sudah divonis pengadilan 14, 7 berkas dalam proses penuntutan dan menunggu sidang 9 perkara.

Selain itu lanjut Kapolri, dalam proses penyidikan 11 perkara terdiri, 4 berkas dengan tersangka melarikan diri sudah di DPO. Sebanyak 7 perkara masih proses untuk menuju P 19. Dalam upaya kepada tersangka yang melarikan diri telah diterbitkan DPO dan telah diterbitkan Red Notice dan telah disebar ke seluruh Interpol.

Sementara Jaksa Agung menjelaskan, untuk terdakwa Robert Tantular sudah di P21 dan tinggal menunggu penetapan sidang yang dijadwalkan bulan Pebruari ini. Untuk terdakwa Totok Kuncoro sudah disampaikan persidangan dan sekarang tahap banding. Dalam penanganan pengembalian aset terpidana Hisyam Alwared dan Rafat yang berada di luar negeri, dikoordinir oleh Menkumham.

Menanggapi hal ini sejumlah anggota Timwas mengharapkan aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras lagi sehingga penanganan kasus Bank Century cepat selesai. Sebagaimana diungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso penanganan kasus Bank Century bisa cepat selesai sehingga bisa fokus kepada masalah-masalah lain yang lebih besar. (mp)foto:wy/parle



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memimpin rapat Timwas Century.



Wakil Ketua DPR/Korpol Priyo Budi Santoso membacakan pengesahan nama-nama Hakim Agung yang lulus uji kelayakan dan kepatutan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2012-2013. Selasa (05/02), foto : iwan a/parle/hr.



Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dipimpin Agun Gunanjar dengan Ketua Ombudsman RI Danang Girindawardana, bahas Evaluasi Pelaksanaan APBN T/A 2012-2013. Senin (04/02), foto : wahyu/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal A Helmy Faisal Zaini terkait masalah realisasi anggaran 2012. Selasa (05/02), foto : wahyu/parle/hr.

